

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah menggambarkan transformasi menuju praktik tata kelola keuangan yang lebih profesional dan terbuka. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, pemerintah daerah Sumatera Selatan terus berupaya memperkuat sistem pelaporan keuangan mereka. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi standar akuntansi yang berlaku, tetapi juga untuk memperkuat integritas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah.

Demi menjaga integritas dan transparansi dalam tata kelola keuangan negara, pemerintah diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang kemudian akan dievaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) guna memastikan keabsahan, keakuratan, kredibilitas, dan kehandalan informasi yang disampaikan. Undang-Undang No. 15 tahun 2006 menegaskan bahwa keuangan negara adalah elemen kunci dalam pelaksanaan pemerintahan negara dan BPK memiliki tanggung jawab untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara secara bebas, mandiri, dan profesional guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi sejumlah karakteristik kualitatif yang telah diatur, seperti kerelevanan, keandalan, kemudahan pemahaman, dan kemampuan untuk dibandingkan, khususnya dalam konteks Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan pemerintah harus diaudit oleh BPK RI, yang kemudian akan menghasilkan (LHP) Laporan Hasil Pemeriksaan berisi Opini BPK sebagai hasil akhir dari proses audit tersebut.

Opini BPK, sebagai pernyataan profesional dari pemeriksa, menilai kesesuaian informasi keuangan dalam laporan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan

efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK RI memiliki potensi untuk memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaporan keuangan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, opini ini menjadi landasan bagi penilaian tingkat akuntabilitas suatu instansi pemerintah, sebagaimana tercermin dalam (LHP) Laporan Hasil Audit atas LKPD yang diterbitkan oleh BPK, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi yang bersangkutan.

Tabel 1.1
Daftar Opini di Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Banyuasin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Empat Lawang	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
3	Lahat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Muara Enim	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Musi Banyuasin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Musi Rawas	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP
7	Ogan Ilir	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP
8	Ogan Komering Ilir	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Ogan Komering Ulu	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
10	Ogan Komering Ulu Selatan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Ogan Komering Ulu Timur	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Lubuk Linggau	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Pagar Alam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Palembang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Prabumulih	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2024

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan memperoleh opini WTP cenderung memiliki manajemen pendapatan yang lebih baik. Pendapatan daerah yang dikelola dengan baik mencerminkan ketepatan dalam pencatatan dan pelaporan, serta kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan. Selain itu, belanja modal yang efektif dan efisien mendukung pembangunan infrastruktur yang baik dan kualitas pelayanan publik, yang berkontribusi pada penilaian opini WTP selain itu temuan audit berperan penting dalam memberikan panduan bagi daerah untuk memperbaiki kelemahan dan

memastikan penggunaan dana publik yang lebih efisien dan efektif, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan daftar opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2019 hingga 2022. Opini audit tersebut mencerminkan hasil evaluasi BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah setempat. Terdapat dua jenis opini utama yang diberikan oleh BPK, yaitu "WTP" (Wajar Tanpa Pengecualian) yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan dapat dipercaya, serta "WDP" (Wajar Dengan Pengecualian) yang menunjukkan ketidakpastian atas informasi keuangan yang disajikan.

Berdasarkan data tersebut, sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan (seperti Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, dan lain-lain) mendapatkan opini "WTP" secara konsisten selama periode 2019-2023, menunjukkan bahwa laporan keuangan mereka dianggap transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh BPK RI. Sementara itu, terdapat beberapa kabupaten/kota yang pada awalnya mendapatkan opini "WDP" (seperti Empat Lawang dan Lahat), namun berhasil meningkatkan opini menjadi "WTP" dalam tahun-tahun berikutnya, menunjukkan perbaikan dalam pelaporan keuangan dan tata kelola keuangan daerah. Hal ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah.

Data opini audit dari BPK RI terkait laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan memiliki keterkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal. Opini "WTP" yang diberikan oleh BPK RI menandakan bahwa laporan keuangan daerah dianggap wajar, dapat dipercaya, dan transparan. Ini mencerminkan bahwa kabupaten/kota tersebut memiliki pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel. Dalam konteks PAD, opini "WTP" dapat memberikan keyakinan kepada investor dan masyarakat terkait kinerja keuangan daerah, yang dapat berdampak positif pada penerimaan PAD karena meningkatkan kepercayaan dan potensi investasi (Zahra et al., 2024)

Sementara itu, Belanja Modal juga terkait dengan opini audit tersebut. Opini "WTP" yang diperoleh kabupaten/kota menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan mereka efektif dan terpercaya, termasuk dalam pengelolaan belanja modal. Belanja Modal merupakan bagian penting dari anggaran daerah yang digunakan untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek pembangunan lainnya. Dengan opini "WTP", kabupaten/kota cenderung dapat mengelola belanja modal dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga menjaga konsistensi dalam penggunaan dana untuk pembangunan daerah secara berkelanjutan. Opini positif dari BPK RI juga dapat memberikan keyakinan bahwa belanja modal dilakukan dengan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 1.2
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2022

(dalam juta rupiah)

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Daerah	3.528.011	3.494.511	3.375.101	3.865.463	4.930.956
Belanja Modal	1.537.275	1.606.220	1.664.697	1.836.834	1.536.370

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan selama periode 2018 hingga 2022, Provinsi Sumatera Selatan mengalami perubahan yang signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal. Pada tahun 2018, Pendapatan Asli Daerah mencapai sekitar 3.494 miliar Rupiah, sedangkan Belanja Modal pada periode yang sama sebesar 1.606 miliar Rupiah. Angka-angka ini mencerminkan keadaan di mana PAD hampir dua kali lipat dari Belanja Modal pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan pendapatan menjadi sekitar 3.375 miliar Rupiah, sementara Belanja Modal tetap stabil di sekitar 1.665 miliar Rupiah. Hal ini menunjukkan adanya tekanan pada pendapatan daerah, namun kebijakan pengeluaran pada Belanja Modal tetap terjaga (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2024).

Pada tahun 2021, terjadi lonjakan signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah, melonjak hingga sekitar 3.865 miliar Rupiah, sementara Belanja Modal juga

meningkat hingga sekitar 1.837 miliar Rupiah. Kenaikan yang tajam ini mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi daerah dan peningkatan investasi dalam pembangunan. Namun, pada tahun 2022, meskipun Pendapatan Asli Daerah mencapai puncaknya sebesar 4.931 miliar Rupiah, Belanja Modal mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi sekitar 1.536 miliar Rupiah. Penurunan ini memunculkan pertanyaan tentang alasan di balik pengurangan signifikan dalam alokasi dana untuk investasi jangka panjang seperti infrastruktur (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2024).

Secara Keseluruhan data tersebut memberikan gambaran tentang kinerja keuangan daerah terkait dengan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Pertumbuhan PAD yang stabil atau meningkat dari tahun ke tahun dapat mencerminkan kemampuan daerah untuk mengelola keuangan dengan baik, yang dapat mendukung opini "WTP" dari BPK terkait transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, Belanja Modal yang terkendali dan sesuai dengan rencana pembangunan daerah juga dapat menjadi faktor pendukung dalam memperoleh opini yang baik dari BPK. Oleh karena itu, analisis terhadap pertumbuhan PAD dan pengendalian Belanja Modal dapat menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah serta hubungannya dengan opini audit yang dikeluarkan oleh BPK.

Studi terdahulu tentang pengaruh pendapatan daerah, belanja modal, dan belanja pegawai terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah cenderung menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel-variabel tersebut. Sebuah penelitian dapat menemukan bahwa peningkatan pendapatan daerah dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan pendapatan yang mencukupi, pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengelola keuangan dengan baik dan menyajikan informasi keuangan secara lebih komprehensif, Muafiq & Chariri, (2023).

Belanja modal dan belanja pegawai yang efektif serta terencana dengan baik juga dapat berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan belanja modal yang transparan dan sesuai dengan

rencana pembangunan dapat mencerminkan kinerja keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas. Selain itu, opini audit dari BPK juga dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Studi-studi sebelumnya mungkin telah menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mendapatkan opini audit yang baik dari BPK cenderung memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dalam penyajian informasi keuangan mereka. Opini positif dari BPK dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan public, Setyawan & Erryana, (2016).

Penelitian terdahulu tentang pengaruh pendapatan daerah, belanja modal, dan belanja pegawai terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan berbagai temuan penting. Hidayat dan Nurhayati (2020) menemukan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan yang baik dari sumber pendapatan lokal dan alokasi belanja modal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Ratnasari dan Setiawan (2019) juga mengidentifikasi bahwa belanja modal dan belanja pegawai yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian ini tidak secara spesifik menguraikan faktor-faktor yang menjadikan belanja modal dan belanja pegawai efektif, menunjukkan adanya kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam.

Ayu dan Purwanto (2021) menunjukkan bahwa pendapatan daerah dan belanja pegawai secara signifikan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, meskipun penelitian ini lebih berfokus pada aspek kualitas daripada akuntabilitas. Santoso dan Kusuma (2022) menyoroti pentingnya efektivitas belanja modal dan belanja pegawai dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah, namun mereka tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti regulasi pemerintah dan tekanan politik yang dapat mempengaruhi akuntabilitas.

Penelitian oleh Fauzi dan Rahmawati (2023) menemukan bahwa belanja modal dan belanja pegawai secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah, namun kontribusi spesifik dari belanja pegawai terhadap akuntabilitas belum dijelaskan secara mendalam.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimana Pengaruh Belanja Modal Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini sehubungan dengan pendapatan daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan
2. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah untuk menguji dan menganalisis :

1. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Belanja Modal Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Belanja Pegawai Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan?

1.4.2 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik yang bersifat akademis maupun praktis. Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat akademis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis tentang pengaruh kemandirian daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di propivinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk menambah bahan kajian bagi mahasiswa lain atau kalangan akademisi lainnya tentang pengaruh kemandirian daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Proivinsi Sumatera Selatan

b. Manfaat praktis

1. Bagi masyarakat Penenelitian ini daharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang yang berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan
2. Pembaca penelitian ini diharapkan menjadi manfaat sebagai tambahan informasi dan masukan serta pertimbangan kinerja keuangan pemerintah daerah dari sisi Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan